



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LOTHARIA LATIF**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **71170**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.387.000.000**

1. Tanah Seluas 717 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/156 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 627.750.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/175 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 637.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/169 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.031.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.927.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **345.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VOXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, LAND ROVER JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



4. MOBIL, NISSAN MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.330.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.362.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.362.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.